

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG** :
- 01 - Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
 - 02 - Meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak
 - 03 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
 - 04 - Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO
 - 05 - Meningkatkan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus
 - 06 - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA
- 3. PROGRAM** : Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.930.000,0
01.05	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	1.930.000,0
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	64.183.323,0
03.03	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.195.039,0
03.05	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	62.988.284,0
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.330.000,0
04.01	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	5.330.000,0
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	2.000.000,0
07.01	Konsolidasi Demokrasi	2.000.000,0
Total		73.443.323,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan		16.650.000,0
01.01	Persentase K/L yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal BAIK	23,81	
01.02	Persentase provinsi yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal BAIK	61,76	
01.03	Jumlah kebijakan kesetaraan gender		
01.04	Persentase perempuan prasejahtera yang memperoleh akses pemberdayaan ekonomi		
01.05	Persentase perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di jabatan publik		
01.06	Persentase perempuan yang memperoleh akses pemberdayaan sosial dan budaya		
03	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak (dihapus)		0,0
03.01	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	65,79	
03.02	Persentase daerah dengan angka perkawinan anak dibawah angka nasional		
03.03	Persentase daerah dengan angka pengasuhan layak diatas angka nasional		
04	Meningkatnya pemenuhan hak anak		16.850.000,0
04.01	Persentase daerah dengan kategori kelembagaan Baik (19 variabel di KLA)	NA	
04.02	Jumlah kabupaten/kota dengan Peringkat KLA	NA	
06	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran keluarga dalam KG, PHP, dan PA		10.350.000,0
06.01	Persentase Daerah yang mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas keluarga	6	
07	Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO		40.507.500,0
07.01	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni)	40	
07.02	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) / Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang minimal merasa puas atas layanan yang diperolehnya		
07.03	Jumlah Unit Layanan yg mendapat akreditasi A untuk layanan perempuan korban kekerasan dan TPPO		
07.04	Jumlah SDM unit layanan yang sudah mendapat sertifikasi layanan perempuan korban kekerasan dan TPPO		
08	Meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		43.187.004,0
08.01	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Menurun	

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
08.02	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni)	68	
08.03	Persentase anak korban kekerasan yang merasa puas atas layanan yg diperolehnya	2	
08.04	Jumlah unit layanan yang mendapat akreditasi A untuk layanan anak korban kekerasan	12	
08.05	Jumlah SDM unit layanan yang sudah mendapat sertifikasi layanan anak korban kekerasan	100	
09	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Satker Kemen PPPA		0,0
Total			127.544.504,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Kebijakan kesetaraan gender dan pelaksanaan PUG yang baik di K/L bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dan daerah	16.650.000,0
01.01	Persentase K/L yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal BAIK	
01.02	Persentase provinsi yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal BAIK	
01.03	Kebijakan kesetaraan gender	
03	Kebijakan pemenuhan hak anak dan kapasitas kelembagaan yang baik di daerah	16.850.000,0
03.01	Persentase daerah dengan kategori kelembagaan Baik (19 variabel di KLA)	
03.02	Jumlah kabupaten/kota dengan Peringkat KLA	
03.03	Kebijakan pemenuhan hak anak	
06	Partisipasi masyarakat dan keluarga dalam PP dan PA yang baik di daerah	10.350.000,0
06.01	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam PP dan PA di daerah	
06.02	Persentase daerah yang mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas keluarga	
07	Kebijakan perlindungan hak perempuan dan unit layanan dan SDM perlindungan perempuan di daerah	40.507.500,0
07.01	Daerah yang difasilitasi unit layanan dan SDM nya untuk layanan perempuan korban kekerasan dan TPPO	
07.02	Kebijakan perlindungan hak perempuan	
09	Layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO (tidak bisa dihapus tersangkut keg lama 2793 PHP KDRT)	0,0
10	Kebijakan perlindungan khusus anak dan unit layanan dan SDM perlindungan anak di daerah	43.187.004,0

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
10.01	Daerah yang difasilitasi unit layanan dan SDM nya untuk layanan anak korban kekerasan dan AMPK	
10.02	Kebijakan perlindungan khusus anak	
10.03	Lembaga dan daerah yang dilaksanakan pengawasan perlindungan anak	
11	Daerah yang memiliki unit layanan perlindungan anak dan SDM yang terstandardisasi (tidak bisa dihapus tersangkut keg lama 2807 PA KE)	0,0
14	Tata kelola pemerintahan yang Baik di Satker Kemen PPPA (tidak bisa dihapus tersangkut keg lama 5914-5921 Sesdep)	0,0
Total		127.544.504,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
2787	Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI)	3.487.004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.487.004,0	0,0	0,0	0,0
2790	Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0	4.410.800,0	4.872.000,0	5.403.400,0
2794	Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0	4.393.507,0	4.831.457,0	5.297.728,0
2795	Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	5.650.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.650.000,0	5.945.000,0	6.267.000,0	6.589.000,0
2797	Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan	6.473.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.473.000,0	6.538.170,0	6.726.170,0	6.957.170,0
2800	Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO	6.668.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.668.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
2805	Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus	5.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.400.000,0	2.550.000,0	3.400.000,0	4.000.000,0
2809	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	5.720.000,0	6.570.000,0	7.420.000,0
2810	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	5.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.800.000,0	650.000,0	750.000,0	850.000,0
2811	Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	4.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.400.000,0	6.300.000,0	6.450.000,0	6.550.000,0
2812	Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0	4.700.000,0	5.400.000,0	6.100.000,0
5918	Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.298.000,0	3.786.000,0	4.493.000,0
5920	Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
6372	Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	1.200.000,0	800.000,0	900.000,0
6373	Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	3.450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.450.000,0	3.904.654,0	4.292.560,0	4.718.910,0
6374	Peningkatan Partisipasi Keluarga	3.350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.350.000,0	3.350.000,0	3.350.000,0	3.350.000,0
6375	Layanan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	7.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.500.000,0	0,0	0,0	0,0

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
6376	Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	19.866.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.866.500,0	0,0	0,0	0,0
6377	Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	20.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.500.000,0	3.730.000,0	3.525.000,0	3.675.000,0
6378	Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	8.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000.000,0	11.108.654,0	14.196.660,0	17.303.416,0
Total		127.544.504,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.544.504,0	70.098.785,0	77.516.847,0	85.907.624,0

Jakarta, 14 April 2021